

## Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Papua Barat

Cici Kurnia Sari Lubis<sup>1</sup> Cindi Mutiara Sari<sup>2</sup> Tengku Indah Syahfitri<sup>3</sup> Roni Sianturi<sup>4</sup> Eko Wahyu Nugrahi<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [cici67220@gmail.com](mailto:cici67220@gmail.com)<sup>1</sup> [cindimutiarasari1110@gmail.com](mailto:cindimutiarasari1110@gmail.com)<sup>2</sup> [isyahfitri313@gmail.com](mailto:isyahfitri313@gmail.com)<sup>3</sup> [ronisianturisanturi3@gmail.com](mailto:ronisianturisanturi3@gmail.com)<sup>4</sup> [ewahyunugrahi@yahoo.com](mailto:ewahyunugrahi@yahoo.com)<sup>5</sup>

### Abstract

*Poverty is an issue that is often discussed by society. This research aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Open Unemployment Rate (TPT), and Human Development Index on poverty in West Papua Province. Using the panel data regression method, the research results partially show that gross regional domestic product, open unemployment rate and human development index do not have a significant influence on poverty, while simultaneously the variables gross regional domestic product, open unemployment rate and human development index have an influence. significant impact on poverty. These findings provide important insights for policy makers in designing more effective and sustainable poverty alleviation programs in West Papua.*

**Keywords:** Poverty, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Open Unemployment Rate (TPT), and Human Development Index (HDI)

### Abstrak

Kemiskinan merupakan isu yang sering diperbincangkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan metode regresi data panel, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara secara simultan variabel produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Papua Barat.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk di negara maju yang masih kesulitan menanganinya. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah Indonesia, yang merupakan negara berkembang. Standar hidup sebagian besar penduduk di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan standar hidup di negara maju. Rendahnya standar hidup ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan atau tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan umum adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara sehingga

mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum dapat diukur dari tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin tinggi kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu target pembangunan yang perlu dievaluasi secara berkala agar tingkat kemiskinan di Indonesia dapat berkurang.

Pemerintah terus melaksanakan kegiatan pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan umum, dengan memfokuskan upaya ke daerah-daerah berkemiskinan tinggi. Pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, masih menghadapi masalah kemiskinan yang menjadi fokus utama pemerintah untuk ditangani. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41% dari total penduduk pada Maret 2019, yang setara dengan 25,14 juta jiwa. Angka ini telah menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana persentase kemiskinan tercatat sebesar 9,82% atau 25,95 juta jiwa. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia telah berkurang sebesar 41 basis poin (bps) atau sekitar 810 ribu jiwa.

Grafik 1. Presentase Kemiskinan di Inodnesia

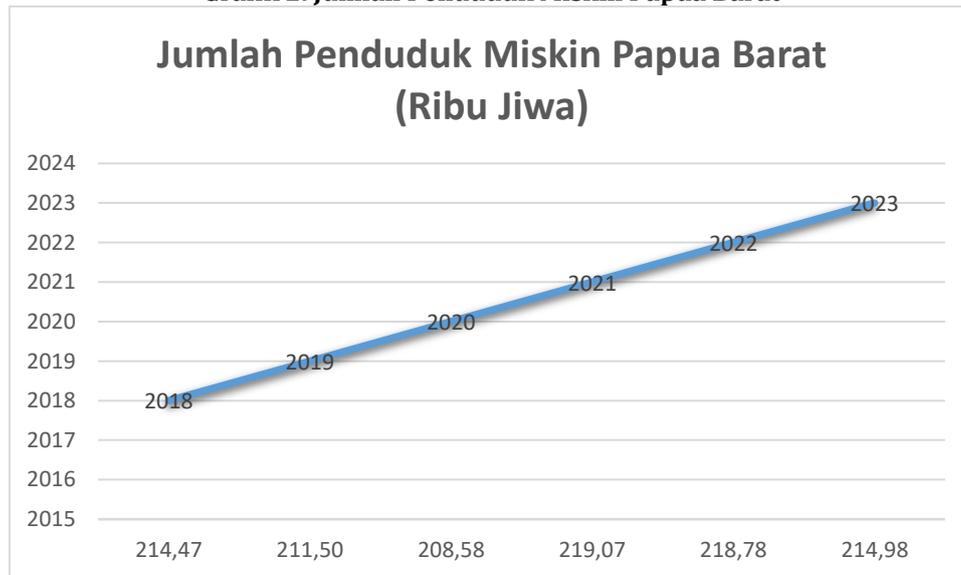


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional dan 5 provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kelima Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi tersebut berada di kawasan timur Indonesia yaitu provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Presentase kemiskinananya adalah sebagai berikut : Papua (26,64%), Papua Barat (21,37%), Nusa Tenggara Timur (20,09%), Maluku (17,44%), dan Gorontalo (15,22%). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Provinsi Papua Barat memiliki persentase kemiskinan tertinggi kedua setelah Provinsi Papua. Namun, dalam lima tahun terakhir, kemiskinan di Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut.

Provinsi Papua Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang juga menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan yang utama akan tetapi belum mempunyai strategi yang kuat untuk mengatasi kemiskinan. Menurut Word Bank (2004) salah satu faktor terjadinya kemiskinan yakni karena adanya pendapatan yang rendah serta set untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap provinsi di Indonesia masing-masing mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda berdasarkan kondisi demografis, hingga kebijakan daerah termasuk di provinsi Papua Barat.

Grafik 2. Jumlah Penduduk Miskin Papua Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Papua Barat selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Angka jumlah penduduk miskin tahun 2018 berada diangka 214,47 Ribuan Jiwa, tahun 2019 naik menjadi 211,50 Ribuan Jiwa, hingga pada tahun 2023 berada diangka 214,98 Ribuan Jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Papua Barat ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam menurunkan angka kemiskinan sehingga nantinya permasalahan kemiskinan akan berkurang atau menurun. Untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika kemiskinan Papua Barat dan merumuskan kebijakan yang efektif, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah tersebut. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Pendapatan membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat diukur dari pendapatan per kapita, Todaro dan Smith, 2006. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah pada periode tertentu yang dihitung dari pendapatan periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut, Sukirno, 2019. Apabila pendapatan masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Wahyu Azizah et al., 2018. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut, Simanjuntak, 2001. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu di tentukan dengan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut.

Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar (Sukirno, 2017). Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus memberhentikan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia. Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antardaerah. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut. Menurut pandangan The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan (Sisnita, 2017). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini ialah untuk melihat apakah PDRB, TPT, dan IPM mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di Papua Barat. Temuan penelitian ini diyakini akan menjelaskan elemen-elemen yang berkontribusi dalam peningkatan kemiskinan di Papua Barat. Dari latar belakang yang diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: Bagaimana PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua Barat? Bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua Barat? Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua Barat? Bagaimana PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Papua Barat.

## **Kajian Pustaka Kemiskinan**

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kemiskinan merupakan keadaan dimana ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut (BPS, 2021) yang dimaksud dengan kebutuhan minimum 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non-makanan yaitu kebutuhan dasar individu seperti papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Semua ukuran kemiskinan berdasar pada pilihan individu dalam pengukuran yang didasarkan konsumsi (consumption based poverty line). Sehingga, garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu: Pengeluaran untuk memberi standar minimum dan kebutuhan mendasar (Aqsa, 2023).

Menurut World Bank (2010), mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup (Suryaningtyas, 2021). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut adalah; (1) terpenuhinya kebutuhan

pangan, (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan, (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Anandanisa, 2018). Kuncoro, (1997) mengukur kemiskinan yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kemiskinan absolut: Seseorang dikategorikan sebagai kemiskinan absolut jika penghasilan mereka ada pada ambang batas dikatakan "miskin" dan tidak mampu mencukupi kebutuhan mendasar dalam hidup mereka.
2. Kemiskinan Relatif: Seorang individu termasuk dalam kategori relatif "miskin" jika mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hidup, namun hal ini masih jauh tertinggal dari kondisi masyarakat sekitar.
3. Kemiskinan Kultural: Jika sikap seseorang atau sekelompok orang tidak mau berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, sekalipun ada upaya lain untuk membantunya, dengan kata lain seseorang menjadi miskin karena sikapnya sendiri, ia tergolong kepada masyarakat miskin budaya yang malas dan tidak mau memperbaiki kondisi dirinya (Hanafi,2023).

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Kakisina, 2016). (Dama, 2016) Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu dengan:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Menurut Nurkse dalam Togar Saragih (2006:7) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu:

1. Dari segi penawaran (supply): tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian akan menyebabkan kekurangan modal dan demikian tingkat produktifitasnya rendah.
2. Dari segi permintaan (demand): di Negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu, disebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya (Syahrullah,2014).

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah fase meningkatnya pendapatan perkapita terus-menerus dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator suatu keberhasilan yang mana semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat (Sukirno, 1996:3). Satu-satunya indikator yang digunakan dalam setiap proses ekonomi untuk menentukan ada tidaknya gejala ekonomi di wilayah tertentu yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), untuk melihat inisiatif ekonomi yang dilakukan serta dilaporkan oleh wilayah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui PDRB (Hanafi,2023). Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya (Syahrullah,2014). Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. PDRB tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah pada periode tertentu. Analisis dan perencanaan pembangunan yang menyangkut dengan perekonomian daerah, seperti struktur perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran daerah, umumnya menggunakan PDRB ini sebagai data dan informasi dasar (Pongsirante, 2023).

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam tingkat nasional, sedangkan dalam tingkat regional menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB terdiri dari beberapa komponen yaitu konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto (NX) yang ditunjukkan dalam pos pendapatan, yaitu:  $Y = C + I + G - NX$ , di mana  $C = C(Y - T)$ .  $Y - T$  dalam persamaan tersebut adalah pendapatan disposable. Oleh karena itu, konsumsi merupakan fungsi dari disposable income. Persamaan tersebut menunjukkan besarnya pendapatan disposable akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika pendapatan disposable tinggi maka tingkat konsumsi juga akan tinggi. Sebaliknya, konsumsi akan turun apabila pendapatan disposable rendah (Wulandari, 2015). Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu produk tertentu, baik atas dasar harga konstan maupun atas harga berlaku (Anandanisa, 2018). PDRB atas harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga per tahun berjalan, PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah pada suatu barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar (Wati, 2023). Menurut Sukirno, (1997) dan Saputra, (2011), Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi (Cholili, 2014).

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kakisina, 2016). Teori Pertumbuhan Ekonomi

Trickle-down effect theory awalnya dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954) dan dikembangkan oleh Ranis dan Fei (1968). Dalam teori tersebut menjelaskan mengenai kesejahteraan yang dicapai oleh beberapa orang secara otomatis jatuh ke bawahnya sehingga mewujudkan terciptanya beragam peluang dan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya juga menciptakan keadaan untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Menurut tokoh ekonomi klasik dalam Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam sistem produksi suatu negara, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Luas tanah yang dapat dipergunakan dalam proses produksi.
4. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

### **Pengangguran**

Secara umum, pengangguran dideskripsikan sebagai suatu kondisi di mana individu yang tergolong dalam bagian angkatan kerja (labor force) tidak mempunyai pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001). Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memiliki pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Pengangguran merupakan keadaan di mana jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya masalah pengangguran adalah turunnya pendapatan masyarakat. Hubungan ini dapat dijelaskan oleh hukum Okun yang menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen (Wulandari, 2015). Pengangguran dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain (Cholili, 2014):

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Pengangguran mempunyai dampak buruk bagi perekonomian, masyarakat maupun individu. Salah satu dampak buruk bagi perekonomian ialah pengangguran akan mengakibatkan masyarakat sulit dalam memaksimalkan kesejahteraan yang ingin dicapai. Sementara bagi masyarakat dan individu ialah mereka akan kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (Fajri, 2019). Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Berhasil atau tidaknya mengatasi masalah pengangguran sangat tergantung pada proses adaptasi yang diterapkan untuk merespons ekonomi global yang selalu berubah. Pengangguran dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu, (Suryaningtyas, 2021):

1. Pengangguran Terbuka, menurut BPS 2020 pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan untuk menentukan jumlah pekerjaan yang tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerja suatu daerah (Hanafi,2023). Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pada 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka umumnya didefinisikan secara konvensional sebagai proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di sebuah negara atau wilayah (Syahrullah,2014). Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP : Jumlah Pengangguran (jiwa)

PAK: Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)

2. Setengah Menganggur, yaitu penduduk atau angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tidak termasuk yang bekerja sementara.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperoleh pilihan masyarakat. Yang paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup dan menikmati standar kehidupan yang layak. Dari definisi pembangunan manusia diatas UNDP menyusun ukuran untuk dapat melihat kesejahteraannya yaitu Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dikembangkan oleh Amartya Sen pemenang nobel India dan Mahbub ul Haq ekonom Pakistan, serta dibantu oleh Gustav Ranis (Universitas Yale) dan Lord Meghnad Desai (London School of Economics) tahun 1990. Sejak itu, IPM gunakan oleh PBB dalam laporan IPM tahunannya. IPM difokuskan untuk hal-hal yang lebih peka dan berguna dari pada hanya sekadar melihat pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Standar Hidup Layak (Susanti,2013). Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Keterangan:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas beberapa komponen yaitu diantaranya, (Anandanisa, 2018):

1. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, manusia dengan indikator angka harapan hidup.
2. Pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi.

3. Tingkat hidup yang layak, dengan indikator pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP).

Ada tiga dimensi yang dapat digunakan untuk menilai teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu umur panjang, dan sehat, yang dijelaskan dengan istilah “Harapan Hidup” yang diturunkan dari angka harapan hidup saat lahir, sedangkan Pendidikan dapat dibuat dengan tingkat melek huruf dan lamanya (Wati, 2023). Ada empat jenis pencapaian dalam pembangunan manusia.

Klasifikasi pencapaian :

Sangat tinggi :  $IPM > 80$

Tinggi :  $70 < IPM < 80$

Sedang :  $60 < IPM < 70$

Rendah :  $IPM < 60$

IPM berkisar antara 0 sampai 100. Angka-angka pada IPM menggambarkan lengkap tentang bagaimana pembangunan manusia yang sejahtera sebagai hasil dari upaya pembangunan suatu negara atau daerah (BPS, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan sebuah riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan.. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Menurut sugiyono, studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen tersebut untuk menghasilkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Rizal, 2022). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) ) khususnya data tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data yang diteliti meliputi PDRB, TPT, IPM, dan Kemiskinan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Data time series periode tahun 2018 – 2022 sedangkan data cross section adalah 13 kabupaten/kota di Papua Barat dan dioalah dengan menggunakan Eviews 12 untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode analisis ekonometrik dengan model analisis data panel. Ragam bentuk model panel ada *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik terdapat *Uji Chow*, *Uji Hausman* dan *Uji Lagrange Multiplier*.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pemilihan Model Estimasi**

**Tabel 1. Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	350.324888	(12,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	290.129825	12	0.0000

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai prob cross section sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, Hal ini berarti FEM lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel dari pada CEM. Selanjutnya uji hausman yang

digunakan untuk memilih apakah pendekatan FEM atau REM yang lebih tepat dilakukan untuk regresi data panel.

**Tabel 2. Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.487864	3	0.0001

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai prob sebesar 0.0001 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 direrima, Hal ini berarti FEM lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel dibandingkan REM. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman tersebut dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat digunakan untuk mengestimasi regresi data panel daripada CEM dan REM. Maka uji lagrange multiplier (LM) tidak perlu dilanjutkan lagi.

### Uji Hipotesis

**Tabel 3. Uji Fixed Effect Model**

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/31/24 Time: 17:20				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 13				
Total panel (balanced) observations: 65				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.246377	7.830713	1.180784	0.2434
PDRB	-4.34E-07	5.77E-07	-0.752734	0.4552
TPT	-0.104350	0.076139	-1.370524	0.1768
IPM	0.153684	0.131858	1.165524	0.2494
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.544754	R-squared		0.997438
Mean dependent var	16.49908	Adjusted R-squared		0.996654
S.D. dependent var	10.84663	S.E. of regression		0.627421
Akaike info criterion	2.115342	Sum squared resid		19.28919
Schwarz criterion	2.650576	Log likelihood		-52.74862
Hannan-Quinn criter.	2.326526	F-statistic		1271.880
Durbin-Watson stat	1.188215	Prob(F-statistic)		0.000000

### Uji t (Parsial)

- Hasil regresi data panel pada tabel 3 menunjukkan variabel PDRB mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.4552 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Penduduk Miskin
- Hasil regresi data panel pada tabel 3 menunjukkan variabel TPT mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.1768 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Penduduk Miskin
- Hasil regresi data panel pada tabel 3 menunjukkan variabel IPM mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.2494 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho

diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Penduduk Miskin

### Uji F (Simultan)

Hasil regresi data panel pada tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas F-statistic 0.000000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PDRB, TPT, IPM) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Penduduk Miskin).

### Koefisien determiniasi (R<sup>2</sup>)

Hasil regresi data panel pada tabel 3 menunjukkan bahwa R-squared 0.997438. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PDRB, TPT, IPM) berpengaruh terhadap variabel dependen (Penduduk Miskin) sebesar 99%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan tabel 3 diatas secara umum persamaan regresi yang dapat disusun adalah sebagai berikut:  $PENDUDUK\ MISKIN = 9.246377 - 4.34E-07 (PDRB) - 0.104350 (TPT) - 0.153684 (IPM) + [CX=F]$  Dari persamaan regersi tersebut dapat dinyatakan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 9.246377 artinya jika variabel bebas seperti PDRB, TPT, dan IPM nilainya tetap maka variabel terikat seperti Penduduk Miskin bernilai sebesar 9.246377.
- Nilai koefisien untuk variabel bebas PDRB adalah sebesar 4.34E-07 artinya setiap kenaikan variabel PDRB sebesar 1 persen maka Penduduk Miskin akan naik sebesar 4.34E-07. Sebaliknya jika variabel PDRB mengalami penurunan sebesar 1 persen maka Penduduk Miskin juga mengalami penurunan sebesar 4.34E-07.
- Nilai koefisien untuk variabel bebas TPT adalah sebesar 0.104350 artinya setiap kenaikan variabel TPT sebesar 1 persen maka Penduduk Miskin akan naik sebesar 0.104350. Sebaliknya jika variabel TPT mengalami penurunan sebesar 1 persen maka Penduduk Miskin juga mengalami penurunan sebesar 0.104350.
- Nilai koefisien untuk variabel bebas IPM adalah sebesar 0.153684 artinya setiap kenaikan variabel IPM sebesar 1 persen maka Penduduk Miskin akan naik sebesar 0.153684. Sebaliknya jika variabel IPM mengalami penurunan sebesar 1 persen maka Penduduk Miskin juga mengalami penurunan sebesar 0.153684.

### Pembahasan

#### Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengujian data dalam penelitian ini, diperoleh  $H_0$  diterima yang berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat. Tabel Coefficient menunjukkan nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0.4552 > 0,05. Hasil penelitian yang tidak signifikan tersebut tidak searah dengan teori Kuznet (2001) dalam Permana (2012), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lopian, Jacline I. Sumual (2016) menunjukkan hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado karena Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat penting untuk mengurangi kemiskinan, Segala sektor lapangan pekerjaan akan berkembang dan kemiskinan dapat dikurangi jika ada distribusi yang adil dan merata dari hasil pertumbuhan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Dama, Lopian, dan Sumual, 2016).

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan**

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan Berdasarkan pengujian data dalam penelitian ini, diperoleh  $H_0$  diterima yang berarti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat. Tabel Coefficient menunjukkan nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar  $0.1768 > 0,05$ . Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Todaro yang menerangkan bahwa pengangguran sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan (Todaro 2003). Menurut Sukirno (1997), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fitria Dita Pramesti (2023) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditemukan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pengangguran tidak berarti bahwa mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Situasi tersebut dikarenakan pengangguran terjadi bukan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (atau dari kelompok dengan pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan), melainkan dari masyarakat yang merasa tidak cocok dengan jenis pekerjaan yang ada, mereka mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka mempunyai sumber pendapatan lain yang mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, peningkatan angka pengangguran ini tidak mempengaruhi angka kemiskinan.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan**

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Berdasarkan pengujian data dalam penelitian ini, diperoleh  $H_0$  diterima yang berarti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat. Tabel Coefficient menunjukkan nilai koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar  $0.2494 > 0,05$ . Hal ini dikarenakan belum terjadi pemerataan dalam pembangunan manusia seperti angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan kualitas hidup utamanya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dalam hal pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dikarenakan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sektor pendidikan. Sarana dan prasarana pendukung ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan harapan lama sekolah. Senada dengan penelitian sebelumnya bahwa proses pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori teori Todaro (2003) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Napitupulu (2007) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Rangkuti (2019) yang mendapatkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa proses pembangunan manusia oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara tidak terlalu signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data panel, ditemukan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode estimasi yang lebih sesuai untuk mengatasi masalah data panel daripada Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam konteks Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB, TPT dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Papua Barat dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-3 di Indonesia. Peningkatan PDRB harus diikuti oleh peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang baik. Karena pembangunan sumber daya manusia yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu berinovasi dan bersaing dalam dunia kerja atau bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktifitas usaha. Produktifitas usaha yang baik tentu akan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah daerah di provinsi Papua Barat seharusnya mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lapangan pekerjaan dimana banyak penduduk miskin bekerja, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat dapat dikurangi. Distribusi yang adil dan merata dari hasil PDRB akan memberikan dampak pada terciptanya pembangunan disegala sektor lapangan pekerjaan dan akan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah di provinsi Papua Barat seharusnya lebih fokus dalam meningkatkan lagi pembangunan manusia di lima provinsi tersebut agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu berinovasi dan bersaing dalam dunia kerja. Atau bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran juga dapat turun. Pemerintah daerah di provinsi Papua Barat seharusnya membuka pelatihan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat

bersaing dalam pasar tenaga kerja serta menambah lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran menurun maka kemiskinan diharapkan juga bisa menurun. Bagi peneliti selanjutnya, agar memperluas batasan-batasan yang ada dalam penelitian ini, seperti memperpanjang periode penelitian, menambah jumlah variabel atau mengganti variabel penelitian lain yang juga dapat mempengaruhi kemiskinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditama, M. R. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran, Tingkat Inflasi, Pdrb Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kriminalitas Ekonomi Di Indonesia Tahun 2013-2018. 1-21.
- Anandanisa, N. P. (2018). Analisis Kemiskinan di Provinsi Papua. 90.
- Aqsa, F. (2023). Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Kepadatan Penduduk dan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 14.
- Ayu, D. S. (2018). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran terbuka, IPM, jumlah penduduk dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (tahun 2010-2015).
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di jawa timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2697-2718.
- Cholili, F. M. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), 14.
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado ( Tahun 2005-2014 ). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 13.
- Fajri, R. E. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk dan Pengangguran terhadap Kriminalitas Perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 9.
- Hanafi, M. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Riil, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2020. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 103.
- Hanafi, M. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Riil, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2020 . Skripsi , 1-84.
- Ilmi, m. b. (2021). Pengaruh PDRB, IPM dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019. Skripsi, 103.
- Kakisina, C. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10.
- Lavenia, L., Mandai, S., & Lutfi, M. Y. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319-328.
- Pongsirante, K. D. (2023). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 12.
- Pramesti, F. D., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 240-250.
- Sari, E. P. (2024). Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022. *Ekodestinas*, 2(1), 36-56.

- Suryaningtyas, R. Y. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2010-2020. (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta), 136.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 18.
- Syahrullah, D. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009-2012. 129.
- Wati, E. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 64.
- Wati, E. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pemabangunan Manusia, PDRB Terhadap kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Skripsi, 63.
- Wulandari, F. H. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012. 17.